

## MENIMBANG PENERAPAN PENDIDIKAN ISLAM DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Oleh: Siti Inayatulloh

(Mahasiswa Prodi MPI Pascasarjana IAIN SMH Banten)

### ABSTRAK

*Pendidikan merupakan kebutuhan hidup semua orang, tanpa pendidikan maka masyarakat tidak akan terbentuk sesuai dengan yang kebutuhan idealnya. Pendidikan menjadi kunci estafet keberlangsungan generasi dan peradaban. Dalam perspektif pendidikan Islam, etimologi pendidikan itu sendiri berasal dari kata arab yakni dari kata rabba yurabi tarbiyatan yang mengandung makna: mengurus, menuntun dan mendidik. Makna pendidikan Islam berarti melakukan serangkaian perubahan seseorang kepada yang lebih dewasa dengan melalui proses tertentu. Secara lebih luas pendidikan mengandung makna pengembangan pribadi seseorang dalam segala aspeknya (Tafsir, 2008:6). Karena fungsi penting pendidikan, masyarakat dalam skala besar seperti negara harus memperhatikan secara khusus pengembangan dunia pendidikan. Untuk keberhasilan proses pendidikan di suatu negara maka terdapat banyak komponen yang saling menunjang terhadap terjadinya proses pendidikan antara lain, kebijakan pendidikan, dukungan anggaran, manajemen kurikulum, fasilitas, SDM, pendidikan dan daya serap masyarakat terhadap output pendidikan. Terkait dengan judul tulisan ini, maka fokus pembahasan akan menitikberatkan kepada dua unsur pokok yang berpengaruh terhadap sistem pendidikan Islam yakni Pola penerapan pendidikan Islam dan Sistem Pendidikan Nasional itu sendiri.*

**Kata Kunci :** *Pendidikan Islam, dan Sistem Pendidikan Nasional*

### Problematika Penerapan Pendidikan Islam

Pendidikan Islam, seperti juga pendidikan pada umumnya, diterapkan dan dipraktikan oleh dua unsur utama yakni: guru sebagai aktor pengajaran dan kurikulum yang digunakan oleh guru sebagai panduan untuk menjalankan fungsi pengajaran. Istilah umum yang digunakan dalam pendidikan Islam, yaitu Tarbiyah (pengetahuan

tentang ar-rabb), Ta'lim (ilmu teoritik, kreativitas, komitmen tinggi dalam mengembangkan ilmu, serta sikap hidup yang menjunjung tinggi nilai-nilai ilmiah), Ta'dib (integrasi ilmu dan amal). Kata Tarbiyah berasal dari kata dasar "Rabba" (رَبَّى), yurabbi (يُرَبِّي) menjadi "tarbiyah" yang berarti memelihara, membesarkan dan mendidik (Nur, 1999). Dalam statusnya sebagai khalifah berarti manusia hidup di alam mendapat kuasa dari Allah untuk mewakili sekaligus sebagai pelaksana dari peran dan fungsi Allah di alam. Dengan demikian manusia sebagai bagian dari alam memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang bersama alam lingkungannya. Tetapi sebagai khalifah Allah maka manusia memiliki tugas untuk memadukan pertumbuhan dan perkembangannya bersama dengan alam.

Padanan kata untuk pendidikan Islam yang lainnya adalah istilah Ta'lim. Secara etimologi, ta'lim berkonotasi pembelajaran, yaitu proses memindahkan ilmu pengetahuan. Hakekat ilmu pengetahuan bersumber dari Allah SWT. Adapun proses pembelajaran (ta'lim) secara simbolis dinyatakan dalam informasi al-Qur'an ketika penciptaan Adam as oleh Allah SWT, ia menerima pemahaman tentang konsep ilmu pengetahuan langsung dari penciptanya (Ramayulis, 2006). Proses pembelajaran ini disajikan dengan menggunakan konsep ta'lim yang sekaligus menjelaskan hubungan antara pengetahuan Adam as dengan Tuhannya. Untuk melaksanakan fungsi tarbiyah, ta'lim dan ta'dib oleh guru ditentukan oleh persepsi kguru dalam melaksanakan tujuan pengajaran. Bagaimanapun sempurna rancangan pengajaran, guru tetaplah mempunyai peranan penting dalam sebuah pendidikan, ia merupakan faktor penentu keberhasilan upaya pendidikan, walaupun hal ini masih terdapat debatable, tetapi ini menunjukkan bahwa betapa eksisnya peran guru dalam dunia pendidikan (Purwanto, 2000:5). Secara teknis keberhasilan itu meliputi kemampuan untuk

melakukan perencanaan pengajaran, pelaksanaan pengajaran, evaluasi pengajaran. Pada tahap perencanaan harus ada kesesuaian antara tujuan dengan proses. Tujuan dari pendidikan Islam terletak pada pembentukan kualitas keimanan dan memberikan pengetahuan keagamaan secara non doktrinal. Ini akan dihadapkan dengan kondisi sistem pendidikan nasional sebagaimana tercermin dalam UU Sisdiknas. Relasi antara penerapan pendidikan Islam dengan UU Sisdiknas terletak pada orientasi umumnya. Pendidikan Islam pada kualitas diri, demikian pula UU Sisdiknas berorientasi pada peningkatan kemampuan. Dari segi aturan dan segi konstruksi kebijakan pendidikan, antara penerapan pendidikan Islam dengan UU Sisdiknas tidak ada masalah. Namun potensi masalah akan dapat diketemukan di tingkat penerapan yakni di tangan guru atau pengajar.

Secara umum, eksistensi pengajar bertujuan untuk melakukan pengembangan sumber daya manusia. Sehingga perencanaan pengajaran, pelaksanaan pengajaran dan evaluasi didasarkan pada kebutuhan pengembangan SDM manusia. Pengajar harus dapat membaca kebutuhan ini, sehingga metode pengajaran yang diaplikasikan tidak berbasis pada pengulangan metode, tetapi pada metode kreatif yang cocok untuk mengembangkan SDM. Kebutuhan SDM antara tahun 80-an berbeda dengan kebutuhan SDM era digital seperti sekarang ini.

Kehidupan masyarakat akan terbentuk lebih baik jika SDM yang dihasilkan oleh pendidikan juga semakin baik, dari segi skill keterampilan, mental dan juga kekuatan iman. Dengan kata lain pendidikan atau tugas guru berhubungan dengan pengembangan sumberdaya manusia yang pada akhirnya akan menentukan kelestarian dan kejayaan kehidupan bangsa (Rony, 1991:117). Jadi perencanaan pendidikan berorientasi pada pengembangan kapasitas, termasuk dalam hal kapasitas penguasaan ilmu keagamaan.

Untuk melaksanakan perencanaan itu diperlukan berbagai variabel pembantu yang mempengaruhi interaksi Proses Belajar Mengajar: pengajar dengan subjek didik. Belajar akan lebih bermakna manakala terjadi interaksi positif antara pengajar dan subjek didik. Mutu pendidikan dimulai dari kualitas proses dan hasil belajar, dan proses itu sendiri terletak pada mutu pertemuan antara guru dan peserta didik (Uwes, 1999: 262). Dalam interaksi belajar mengajar peranan guru merupakan kunci yang amat penting yang mempunyai pengaruh langsung terhadap proses belajar. Konten pendidikan tidak bersifat dogmatis, karena salah satu sifat pendidikan adalah semangat keilmuan. Ketika agama dan materi keagamaan disajikan dalam konsep pendidikan sebagaimana dimaksud oleh UU Sisdiknas, maka agama tidak lagi bersifat dogmatis tetapi terbuka terhadap kajian dan mungkin untuk dipertanyakan secara kritis dari segi-seginya. Dalam pengajaran keagamaan, perlu memperhatikan unsur-unsur manusiawi seperti sikap, nilai, perasaan, motivasi dan lain-lain yang dapat diharapkan merupakan hasil proses pengajaran (Sujana, 1998:12). Dalam masyarakat Islam, guru dipandang sebagai *type ideal*, teladan (*uswah*), sedangkan dalam sistem pendidikan nasional, guru merupakan pribadi yang profesional (tidak harus ideal). Profesional berkaitan dengan kompetensi sedangkan keteladanan berkaitan dengan dedikasi.

Dewasa ini citra guru di mata masyarakat mengalami pergeseran, kalau dahulu dijadikan manusia segala sumber, kini jabatan guru tidak dipandang sebagai jabatan istimewa, banyak orang sekarang ini yang menjadikan profesi guru sebagai jalan alternatif pekerjaan. Status guru agama di sekolah sampai perguruan tinggi bukan lagi tipikal *uswah* tetapi tipikal profesi. Oleh karena sifat pendidikan keagamaan bertitik tekan pada pembentukan akhlak, guru yang bertipikal profesi ini harus dapat mencapai tujuan

pendidikan Islam. Pendidikan Islam di sekolah-sekolah formal tidak sebatas formalitas dan suplemen yang berdasarkan perintah aturan yuridis. Adanya pendidikan keagamaan di sekolah-sekolah karena undang-undang memerintahkan demikian. Ini penurunan mutu pendidikan keagamaan, Islam terutama. Untuk mengantisipasi problem ini diperlukan kerangka minimum yakni kurikulum pengajaran pendidikan Islam.

### **Konten Dan Sinkronisasi Tujuan Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional**

Di dalam kurikulum akan dicantumkan isi, konten, proses, metode dan upaya pencapaian terstruktur. Kurikulum pendidikan Islam dalam sekolah nasional memerlukan penyempurnaan untuk mewujudkan ruh pendidikan Islam, relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Sementara ini dapat diamati di lapangan bahwa konten pendidikan Islam untuk siswa SMP sampai dengan perguruan tinggi cenderung sama. Bahkan alat evaluasi yang digunakan juga hampir serupa hanya berbeda dari segi metode penyampaian dan bahasa penyampaian.

Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 35 dan 36 yang menekankan perlunya peningkatan standar nasional pendidikan sebagai acuan kurikulum secara berencana dan berkala dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dalam hal Pendidikan Islam perlu ditetapkan apa standar yang digunakan, apakah itu relevan terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat atau tidak? Orientasi standar pendidikan pada kurikulum nasional bertumpu pada tujuan pendidikan nasional, sedangkan tujuan pendidikan Islam tidak berkaitan dengan sifat nasional tetapi dihubungkan dengan kualitas individual dalam hal keagamaan (kualitas keagamaan).

Kurikulum menurut pengertian modern adalah segala pengalaman dan kegiatan pembelajaran yang direncanakan dan diorganisir untuk diatasi oleh para siswa agar mencapai tujuan, dan merupakan keseluruhan usaha sekolah untuk mempengaruhi belajar, baik berlangsung di kelas maupun di luar sekolah (Lubis, 2011:3). Kurikulum hadir dengan fungsi sebagai pedoman atau acuan. Bagi pengajar, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar. Sementara bagi kepala sekolah, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam melakukan supervisi atau pengawasan. Bagi orang tua, kurikulum berfungsi sebagai pedoman penilaian kualitas pendidikan. Sedangkan bagi peserta didik, berfungsi sebagai pedoman belajar (Sanjaya, 2010: 113). Bagi masyarakat, kurikulum berfungsi sebagai bentuk konkrit kebutuhan masyarakat terhadap pengembangan pendidikan. Apa yang dibutuhkan masyarakat dapat dijawab oleh kurikulum.

Di Indonesia beberapa kali mengalami perbaikan kurikulum, diantaranya kurikulum 1994 yang pada gilirannya diganti dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi tahun 2004. Penerapan KBK pun disekolah tidak bertahan lama karena dua tahun kemudian, tepatnya 2006 pemerintah Indonesia meluncurkan kurikulum baru yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sebagai penyempurna dari kurikulum sebelumnya. Perlu dipahami pula, perubahan kurikulum dari masa ke masa menyangkut perubahan struktural dan perubahan konseptual dan kini juga akan dikenalkan dengan kurikulum baru yaitu kurikulum 2013. Menurut Mohammad Nuh sebagai menteri pendidikan bahwa kurikulum 2013 dirancang sebagai upaya mempersiapkan generasi 2045 yaitu tepatnya 100 tahun Indonesia merdeka, sekaligus memanfaatkan populasi usia produktif yang jumlahnya sangat melimpah agar menjadi bonus demografi dan tidak menjadi bencana demografi

(Muzamiroh, 2013: 112) Tetapi perubahan ini belum menyentuh aspek religiusitas seseorang.

Persoalan kurikulum lebih menyoal pada hal-hal teknis yang semestinya ini diserahkan pada lapangan kompetensi. Ketika pengajar sudah memiliki kompetensi maka serahkan proses teknis ini kepadanya. Hal semacam ini memang menjadi beban tersendiri bagi guru dengan kemampuan beragam terutama di awal tahun pembelajaran. Silabus dan bahan ajar dibuat oleh pemerintah, sedangkan guru hanya mempersiapkan RPP dan media pembelajarannya. Akan ada hambatan berupa kesenjangan antara materi yang hendak diajarkan dengan baku teknis kurikulum. Sedangkan masyarakat membutuhkan SDM dengan suatu materi, namun ketika materi itu tidak dapat disajikan karena keterbatasan teknis, maka haruskah kepentingan masyarakat yang dikorbankan? Persoalan ini muncul dalam contoh menurunnya kualitas sikap dan moral anak – anak atau generasi muda (Rohman, 2012:1). Guru dengan tipikal *uswah*, keteladanan, dapat mengatasi problem ini, tetapi UU Sisdiknas lebih condong kepada kompetensi profesi. Seseorang dengan penguasaan religi yang memadai dan pribadi yang tawadhu dalam agama tidak dapat menjadi pengajar agama di sekolah karena tidak memiliki syarat kompetensi. Sedangkan guru-guru agama di sekolah nasional merupakan tuntutan-kewajiban profesi bagi mereka, bukan panggilan jiwa, sehingga tidak diperlukan *uswah*, cukup dengan mengajarkan agama sesuai dengan perintah teknis kurikulum. Karakter siswa tidak dapat dibangun oleh guru dengan tipikal ini, demikian pula pengembangan SDM berkualitas tidak dapat dikembangkan guru dengan tipikal ini.

Istilah karakter dipakai secara khusus dalam kondisi dalam konteks pendidikan baru muncul pada akhir abad ke-18. Terminologi ini mengacu pada sebuah pendekatan idealis-spiritualis dalam pendidikan yang juga dikenal dengan teori pendidikan

normatif yang menjadi prioritas adalah nilai-nilai transenden yang dipercaya sebagai motor penggerak sejarah, baik bagi individu maupun bagi sebuah perubahan sosial. Arti dan makna karakter, berasal dari bahasa latin, yaitu: "karakter," kharassein," dan "kharax" yang bermakna "tools for marking," to engrave dan pointed stake (Wibowo, 2012:21). Kata ini mulai banyak digunakan dalam bahasa Perancis sebagai "character". Selanjutnya, dalam bahasa Indonesia seperti kata "character" ini menjadi karakter.

Memahami istilah karakter memiliki dua pengertian tentang karakter, pertama menunjukkan bagaimana seseorang bertingkah laku. Apabila seseorang berperilaku tidak jujur, kejam tentulah orang tersebut memanasifestasikan perilaku buruk. Kedua istilah karakter erat kaitannya dengan personality. Seseorang baru disebut berkarakter apabila tingkah lakunya sesuai kaidah moral. Selanjutnya Endah Sulistyowati (2012:32) menyebutkan secara psikologis dan sosial kultural, pembentukan karakter merupakan fungsi seluruh potensi individu manusia (kognitif, afektif, konatif dan psikomotorik) yang berlangsung sepanjang hayat.

Karakter adalah gambaran tingkah laku yang dimiliki oleh seseorang yang mencerminkan nilai – nilai kehidupan dan melekat pada diri seseorang. Bagi siswa, diperlukan contoh riil, adanya *uswah* untuk dapat melekatkan suatu nilai-nilai yang baik pada dirinya. Manusia berkarakter memiliki ranah kognisi, afeksi, dan psimotor yang baik, ditambah dengan emosi, spiritual, ketahanan menghadapi masalah (adversity), dan sosial. Namun perlu diperhatikan perbedaan antara spiritualitas dengan religiusitas. Masyarakat modern menerima spiritualitas sebagai gejala psikologi, sehingga masyarakat bisa saja bertuhan tetapi tidak harus beragama. Penggubahan standar keagamaan kepada spiritualitas merupakan pendangkalan keagamaan Islam yang kaffah.

Hal inilah yang menyebabkan persoalan budaya dan karakter bangsa kini menjadi sorotan tajam masyarakat dan tidak dapat diatasi. Karakter pendidikan Islam adalah muslim yang muttaqin. Pendidikan Islam bukan semata-mata untuk membentuk budi pekerti. Sementara budi pekerti adalah bagian kecil dari output pendidikan Islam. Dan Islam telah menyimpulkan bahwa pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk Insan kamil, akhlakul karimah. Iman Al-Ghazali berpendapat bahwa pentingnya pendidikan Islam ialah usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Pendidikan Islam bukan sekedar mengisi otak dengan segala macam ilmu yang tentang tatacara peribadatan (syarat formil), melainkan mendidik akhlak dan suasana bathin (tarikah) seseorang untuk mempersiapkan diri ke hari kebangkitan (marifat). Kompetensi kelulusan dalam pendidikan Islam harus memiliki indikator yang jelas dan terstruktur, tidak tumpang tindih pula. Indikator kelulusan keagamaan antara SMP, SLT dan Perguruan tinggi harus terstruktur pula.

Standar Kompetensi Lulusan terekam dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki oleh peserta didik mata kuliah /mata pelajaran pendidikan keagamaan yang telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu atau jenjang pendidikan tertentu, sehingga memiliki gambaran mengenai kompetensi utama yang dikelompokkan ke dalam aspek sikap, keterampilan, dan pengetahuan di suatu jenjang pendidikan. Kualifikasi kelulusan tidak hanya bertumpu pada kompetensi inti atau kompetensi formal sebagaimana diatur dalam K13. Kompetensi Inti harus menggambarkan kualitas yang seimbang antara pencapaian *hard skills* dan *soft skills*. Fungsi Kompetensi Inti sebagai unsur pengorganisasi (*organising element*) kompetensi dasar. Sebagai unsur pengorganisasi, Kompetensi Inti merupakan pengikat untuk organisasi vertikal dan organisasi horizontal Kompetensi Dasar. Organisasi vertikal Kompetensi Dasar adalah keterkaitan antara

konten Kompetensi Dasar satu kelas atau jenjang pendidikan ke kelas/jenjang di atasnya sehingga memenuhi prinsip belajar yaitu terjadi suatu akumulasi yang berkesinambungan antara konten yang dipelajari peserta didik. Organisasi horizontal adalah keterkaitan antara konten. Kompetensi Dasar satu mata pelajaran dengan konten Kompetensi Dasar dari mata pelajaran yang berbeda dalam satu pertemuan mingguan dan kelas yang sama sehingga terjadi proses saling memperkuat.

Kompetensi Inti dirancang dalam empat kelompok yang saling terkait yaitu berkenaan dengan sikap keagamaan (Kompetensi Inti 1), sikap sosial (Kompetensi Inti 2), pengetahuan (Kompetensi Inti 3), dan penerapan pengetahuan (Kompetensi Inti 4). Keempat kelompok itu menjadi acuan dari Kompetensi Dasar dan harus dikembangkan dalam setiap peristiwa pembelajaran secara integratif. Kompetensi yang berkenaan dengan sikap keagamaan dan sosial dikembangkan secara tidak langsung (*indirect teaching*) yaitu pada waktu peserta didik belajar tentang pengetahuan (Kompetensi Inti 3) dan penerapan pengetahuan (Kompetensi Inti 4).

Pendidikan Islam adalah sebuah sarana untuk menyiapkan masyarakat muslim yang benar-benar mengerti tentang Islam dari segi syariat, tarikat dan segi marifatnya. Di sini para pendidik muslim mempunyai satu kewajiban dan tanggung jawab untuk menyampaikan ilmu yang dimilikinya kepada anak didiknya secara lengkap dan tidak dipotong-potong. Pendidikan Islam berbeda dengan pendidikan yang lain. Pendidikan Islam lebih mengedepankan nilai-nilai keislaman dan tertuju pada terbentuknya manusia yang ber-akhlakul karimah serta taat dan tunduk kepada Allah semata. Sedangkan pendidikan selain Islam, tidak terlalu memprioritaskan pada unsur-unsur dan nilai-nilai keislaman, yang menjadi prioritas hanyalah pemenuhan kebutuhan inderawi semata. Oleh karena itu, penerapan pendidikan Islam pada sekolah nasional

dilakukan berjenjang dengan konten materi yang purna. Misalnya untuk tingkat SMP menitikberatkan pada penguasaan dan pemahaman tatacara (syariat) pada tingkat SLTA lebih menekankan pada pemahaman perilaku (tarikah), perbedaan pendapat dalam Islam. Sedangkan pada perguruan tinggi diberi pemahaman tentang tujuan dari sistem Islam berupa Insan kamil, pemahaman marif billah.

Selain persoalan konten, adanya dikotomi Kementrian agama dan Departemen pendidikan membuat penyatuan konten pendidikan juga semakin rumit. Jika sekolah umum menetapkan standar tersendiri dalam konten pengajaran, maka kementrian agama juga mempunyai standar berbeda pula. Kerumitan itu ditambah dengan status guru-guru agama pada sekolah negeri ada di bawah naungan Kemenag. Demikian juga pada beberapa perguruan tinggi swasta tidak jarang ditemukan adanya dosen yang diperbantukan (DPK) dari Kemenag untuk menngampu mata kuliah agama. Maka sinkronisasi materi pengajaran semakin sulit dilakukan.

Untuk mengatasi persoalan ini, upaya sinkronisasi dapat dilakukan dengan dukungan kebijakan, yakni produk kebijakan pendidikan Islam. Kebijakan Pendidikan menjelaskan bahwa adanya kebijakan atau campur tangan negara dalam pelaksanaan pendidikan Islam. Menurut Carter V Good (dalam Ali Imron,2001) memberikan pengertian kebijakan pendidikan (educational policy) sebagai suatu pertimbangan yang didasarkan atas sistem nilai dan beberapa penilaian atas faktor-faktor yang bersifat situasional, pertimbangan tersebut dijadikan sebagai dasar untuk mengopersikan pendidikan yang bersifat melembaga. Pertimbangan tersebut merupakan perencanaan yang dijadikan sebagai pedoman untuk mengambil keputusan, agar tujuan yang bersifat melembaga bisa tercapai. Jadi sinkronisasi pendidikan Islam di sekolah-sekolah umum dilakukan secara kelembagaan, tidak parsial oleh guru-guru yang pada

akhirnya tetap berpotensi tumpang tindih konten materi, orientasi pendidikan Islam yang berbeda pula.

Sinkronisasi ini bersifat terbuka, dimana orang tua atau masyarakat dapat melihat atau memperhatikan konten keagamaan yang diberikan. Sebagaimana diketahui, Islam sebagai agama memiliki banyak firqah yang setiap aliran ini memiliki sistem religi dan praktik yang bersifat khas. Pendidikan Islam yang dilakukan wahabi atau gerakan fundamental Islam lain akan dengan mudah diberikan pada anak didik dan menghasilkan generasi fundamental baru. Embrio fundamentalisme dan fanatisme keagamaan sudah dapat dimunculkan sejak peserta didik sudah dapat diajak berpikir mandiri.

Bahkan tidak jarang ditemukan pegajaran Islam yang bersifat pendakuan kebenaran hanya ada dalam pendapatnya saja, sehingga praktik keagamaan Islam di Nusantara yang beragam dan telah menyerap kultur lokal dianggap sebagai pendapat keagamaan yang bersifat bidah dan keliru. Konsekuensinya adalah embrio perpecahan di kalangan muslim nusantara. Pendakuan kebenaran dan merasa telah melakukan sistem religi Islam paling syar'i secara substantif bukan merupakan pendidikan Islam, tetapi pendidikan fundamentalis ataupun dalam bentuk arabisasi pendidikan Islam. Kondisi sangat potensial ditemukan dalam lembaga pendidikan swasta yang berafiliasi dengan organisasi keislaman tertentu. Campur tangannya organisasi massa (ormas) Islam yang memayungi sekolah-sekolah berbasis keislaman mendatangkan persoalan tersendiri.

Keinginan ormas untuk menunjukkan jati diri politis cukup kental dengan memasukkan sejumlah matapelajaran yang berkaitan dengan asal usul pendirian ormas tersebut. Sebut saja misalnya ada materi kemuhammadiyah yang diberikan mulai dari sekolah dasar hingga ke perguruan tinggi. Demikian pula materi ahlu sunnah wal jamaah diberikan untuk sekolah yang berbasis ormas Nadhatul

Ulama (NU) atau yang di dirikan oleh para tokoh NU. Sekolah atau madrasah yang terkait kedua organisasi massa Islam terbesar di Indonesia itu seolah ingin menunjukkan jati diri mereka masing-masing sebagai sekolah yang "paling benar" dalam mengemban misi dan visi keislaman. Dalam hal ini organisasi seperti Nu dan Muhammadiyah merupakan organisasi yang moderat, sedangkan dewasa ini lembaga-lembaga dakwah yang syarat dengan muatan islam konservatif mudah diketemukan. Sehingga di tingkat hal-hal kecil saja terdapat pemaknaan yang serba hitam putih. Misalnya kata kerudung dianggap sebagai bagian dari praktik keagamaan yang keliru (hitam) dan yang lebih benar adalah hijab (diasumsikan lebih islami). Ini akan mendatangkan persoalan pada pemaknaan praktik peribadatan yang lebih kompleks.

Oleh karena itu diperlukan suatu kebijakan terkait kurikulum dan konten pendidikan agama Islam yang memadai dan sesuai dengan jiwa dan perkembangan anak, jiwa bangsa Indonesia yang multikultural. Kurikulum menurut pengertian modern adalah segala pengalaman dan kegiatan pembelajaran yang direncanakan dan diorganisir untuk diatasi oleh para siswa agar mencapai tujuan, dan merupakan keseluruhan usaha sekolah untuk mempengaruhi belajar, baik berlangsung di kelas maupun di luar sekolah. Kurikulum hadir dengan fungsi sebagai pedoman atau acuan. Bagi guru, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar. Sementara bagi kepala sekolah dan pengawas, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam melakukan supervisi atau pengawasan. Bagi orang tua, kurikulum berfungsi sebagai pedoman guna membimbing anaknya belajar di rumah.

Bagi masyarakat, kurikulum berfungsi sebagai pedoman untuk memberikan bantuan bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Sedangkan bagi peserta didik, berfungsi sebagai pedoman belajar. Output pendidikan Islam di sekolah bukan mengajarkan

peserta didik untuk menilai perilaku peribadatan orang lain dalam kacamata benar dan salah. Pengetahuan keagamaan yang benar dan tepat bersifat relatif bergantung pada bagaimana rujukan dan isjtihad pengajar yang memberikan pendidikan itu.

Sinkronisasi dapat dimulai dari perencanaan manajerial pendidikan Islam skala nasional. Proses pendidikan Islam akan berjalan dengan baik apabila di dalam kebijakan pendidikan Islam tersebut terdapat sistem manajemen yang baik. Hal ini sesuai dengan pengertian manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Organisasi dalam hal ini merujuk pada pengajar pendidikan Islam atau stakeholder pendidikan Islam. Manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain (pengajar) dan mengawasi usaha-usaha individu (pengajar pendidikan Islam di berbagai sekolah) melalui sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan agenda sinkronisasi pendidikan Islam.

Sinkronisasi dilakukan dalam hal internal (konten materi pendidikan Islam) dan eksternal (kebijakan pendidikan Islam). Konsep sinkronisasi ini merupakan alternatif untuk mengantisipasi adanya dikotomi pendidikan agama di Kemenag dan pendidikan nasional di Kemdiknas. Penyatuan dua departemen ini dalam satu wadah pendidikan akan memakan waktu lama karena berhubungan dengan tata organisasi kepegawaian, dan kompleksitas anggaran.

Problem penyatuan bukan berada pada masalah materi, konten pendidikan Islam itu sendiri.

Meskipun Indonesia merupakan negara yang mayoritas Islam. Akan tetapi dalam hal pendidikan, penerapan pendidikan Islam tidak dapat menentukan berdasarkan spirit keislaman itu sendiri tetapi ditentukan oleh kebijakan dan manajerial sekolah. Di tingkat kebijakan, sudah tidak perlu diperdebatkan, sedangkan di tingkat manajerial masih dapat diantisipasi dengan sinkronisasi ini. Praktik manajemen pendidikan secara umum menempatkan pendidikan Islam di pandang selalu berada pada posisi deretan kedua atau posisi marginal dalam manajemen pendidikan di sekolah-sekolah. Keberadaannya hanya untuk memenuhi syarat formil. Padahal pendidikan Islam, pada hakekatnya pendidikan yang menitikberatkan pada pengembangan harkat dan martabat manusia, memanusiaikan manusia agar benar-benar mampu menjadi khalifah, bukan skill terapan yang parsial sebagaimana pendidikan umum.

Namun untuk mencapai kondisi ideal minimum dalam pendidikan Islam pun masih mengalami kendala. Kendala manajemen pendidikan Islam yang terletak pada ketidak jelasan tujuan yang hendak dicapai, ketidak serasian kurikulum terhadap kebutuhan masyarakat, konten pendidikan Islam yang tumpang tindih antar jenjang pendidikan. Tidak ketinggalan problem laten berupa kurangnya tenaga pendidik yang berkualitas dan profesional, terjadinya salah pengukuran terhadap hasil pendidikan serta masih belum jelasnya landasan yang dipergunakan untuk menetapkan jenjang-jenjang tingkat pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga keperguruan tinggi. Bagaimanapun juga pendidikan Islam dapat digunakan untuk meningkatkan SDM di Indonesia. Bahwa pengembangan SDM bukan hanya milik pendidikan sekolah nasional melalui bidang-bidang pendidikan keterampilan. Pendidikan Islam dapat meningkatkan kualitas SDM Indonesia.

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) merupakan bagian dari ajaran Islam, yang dari semula telah mengarah manusia untuk berupaya meningkatkan kualitas hidupnya yang dimulai dari pengembangan budaya kecerdasan. Ini berarti bahwa titik tolaknya adalah pendidikan yang akan mempersiapkan manusia itu menjadi makhluk individual yang bertanggung jawab dan makhluk sosial yang mempunyai rasa kebersamaan dalam mewujudkan kehidupan yang damai, tentram, tertib, dan maju, dimana moral kebaikan (kebenaran, keadilan, dan kasih sayang) dapat ditegakkan sehingga kesejahteraan lahir batin dapat merata dinikmati bersama. Tujuan utama atau akhir (*ultimate aim*) pendidikan dalam Islam adalah pembentukan pribadi *khalifah* bagi anak didik yang memiliki fitrah, roh dan jasmani, kemauan yang bebas, dan akal. Pembentukan pribadi atau karakter sebagai *khalifah* tentu menuntut kematangan individu, hal ini berarti untuk memenuhi tujuan utama tersebut maka pengembangan sumber daya manusia adalah suatu keniscayaan. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan tersebut strategi untuk menggapainya adalah dengan jalan sinkronisasi konten pendidikan Islam.

Dalam Islam sosok manusia terdiri dua potensi yang harus dibangun, yaitu lahiriah sebagai tubuh itu sendiri dan ruhaniyah sebagai pengendali tubuh. Pembangunan manusia dalam Islam tentunya harus memperhatikan kedua potensi ini. Jika dilihat dari tujuan pembangunan manusia Indonesia yaitu menjadikan manusia seutuhnya, maka tujuan tersebut harus memperhatikan kedua potensi yang ada pada manusia.

## Penutup

Pendidikan Islam ke depan tidak hanya lebih memprioritaskan kepada ilmu terapan yang sifatnya aplikatif, bukan saja dalam ilmu-ilmu agama yang bersifat pengetahuan umum dasar. Islam adalah sistem kompleks yang ajaran-ajarannya diwahyukan Allah kepada manusia melalui Nabi Muhammad SAW sebagai rasul. Islam pada hakikatnya, membawa ajaran-ajaran yang bukan hanya mengatur satu segi, tetapi mengenai berbagai segi kehidupan manusia. Sedangkan konten pendidikan agama pada sekolah nasional bersifat akademis, parsial. Oleh karena itu penerapan pendidikan Islam harus berusaha mengintegrasikan antara ruh Islam ke dalam sistem pendidikan nasional yang dilakukan dari sisi filosofis, kurikulum, metodologi, pengelolaan, bahkan sampai pada aplikasi teknisnya. Penerapan pendidikan Islam harus dibawakan oleh pegnajar-pegajar yang berdedikasi bukan hanya yang berkompeten sehingga mampu melahirkan manusia yang berkualitas, handal dalam penguasaan ilmu pengetahuan, keterampilan, unggul dalam moral yang di dasarkan pada nilai-nilai ilahiah sebagai produk pendidikan Islam.

## Daftar Bacaan

- Ahmad Tafsir, 2008. *Ilmu Pendidikan dalam Persepektif Islam*, (Bandung: Rosda Karya)
- M. Ngalim Purwanto, 2000. *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung: Rosda Karya)
- Mida Latifatul Muzamiroh, 2013. *Kupas Tuntas Kurikulum 2013* (Jakarta: Katapena)
- Muhammad Rohman, 2012. *Kurikulum Berkarakter* (Jakarta: Prestasi Pustaka)

- Nana Sujana, 1998. *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar* (Bandung: Sinar Abnu Algensinso)
- Mara Samin Lubis, 2011. *Telaah Kurikulum*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis)
- Sanusi Uwes, 1999. *Managemen Pengembangan Mutu Dosen*, (Jakarta: Logos)
- T. Raka Joni, 1991. *Pokok-pokok Pikiran Mengenai Pendidikan Guru* (Jakarta: Grasindo)
- Wina Sanjaya, 2010. *Kurikulum dan Pembelajaran*, (Jakarta: Kencana)
- Endah Sulistyowati, 2012. *Implementasi Kurikulum Pendidikan Karakter*. (Yogyakarta: Citra Adji Parama)